

Faktor sosial budaya (*social and cultural factor*) memerlukan penataan kembali sesuai dengan nilai-nilai dan asas-asas kehidupan nasional yang kini disebarluaskan melalui pemasyarakatan Pancasila, sehingga setiap nilai dan unsur pemecah dapat dieleminasi, baik yang berbentuk isu kelompok, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kelompok-kelompok batas dibina sebagai sarana sosial menuju kesatuan bangsa.³⁶

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan pembahasan dan uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Dapat diketahui bahwa modus dari pelaku tindak pidana tersebut werving tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menjanjikan korbanya bahwa pelaku dapat mengurus korban/anak korban menjadi seorang prajurit TNI.
2. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana werving yang pertama sesuai dengan ketentuan KUHP tentang penipuan (378 KUHP) dan

³⁶ Henkie Liklikuwata. *Op.Cit.* h 266-273.

penggelapan (372 KUHP) lalu di susul dengan sanksi administrasi yang melekat pada prajurit TNI yakni dalam pasal 126 KUHPM dan KUHDPM pasal 12 ayat (1) dan (2).

B. Saran

Saran penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan diatas adalah :

1. Menurut penulis baiknya di lakukan transparansi yang lebih terbuka dalam penerimaan calon prajurit dan di berikan tanda dari petinggi baik pejabat maupun instansi yang berwenang kepada panitia yang terlibat dalam penerimaan calon anggota ,sehingga masyarakat sipil dapat membeedakan untuk menghindari modus pelaku tersebut.
2. Sanksi yang di berikan sudah cukup memberikan hukuman yang berat , akan tetapi masi banyak anggota yang masih menghiraukanya karna anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya di belakangi oleh jabatan yg lebih tinggi dengan penjatuhan hukuman yang lebih ringan , baiknya rantai saling membackup seperti ini di usut tuntas .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Badan Pembinaan Hukum, *Himpunan Peraturan Perundangan Bagi Prajurit*, Jilid IV, Jakarta, hlm.443.

Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. hal 1-2.

Djoko Subroto, 1997, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gajah Mada University Press, Magelang.

Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

H. Salim, HS, SH, MS, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta.

Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T ALUMNI, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta.

Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Jurnal

Hari Soebagijo. April 2011, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemeikrasaan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Umum*, Jurnal Law Reform. Vol 6 No 1, h 24

Henkie Liklikuwata, 1980. *Hubungan Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jurnal UI. Vol 10 No 3. h 266-273.

Tomy Dwi Putra, April 2013, *Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*, Lex Crimen Jurnal. Vol.II No. 2. h 5-20

Internet

Diakses melalui
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada hari
Senin, 14 Mei 2018 pada pukul 22.09

Fahrizal Syam, 14 September 2016, *Begini Modus Oknum TNI AD Terima Sogokan dari Calon Tentara*, Tribunews.com,
<https://www.tribunnews.com/regional/2016/09/14/begini-modus-oknum-tni-ad-terima-sogokan-dari-calon-tentara>, diakses pada 21 November 2020.

https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA?auto=download, diakses pada 15 November 2020.

Muhammad Idris, 23 Juni 2020, *Besaran Gaji TNI plus Tunjangannya, dari Tantama hingga Jenderal*, money.compas.com,
<https://money.kompas.com/read/2020/06/23/083722326/besaran-gaji-tni-plus-tunjangannya-dari-tamtama-hingga-jenderal?page=all>, diakses pada 21 November 2020.

Pengertian tindak pidana <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>, diakses pada 15 November 2020.

Pengertian tindak pidana <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>, diakses pada 15 November 2020.

Pengertian werving <https://glosarium.org/arti-werving/>, diakses pada 15 November 2020.

Senjaya, 5 Mei 2020, *BPS Catat hingga Februari 2020 ada 800.00 Pengangguran di Jateng*, Antaraneews, <https://www.antaranews.com/berita/1467795/bps-catat-hingga-februari-2020-ada-800000-pengangguran-di-jateng>, diakses pada 21 November 2020

Syarat bintang www.tniad.mil.id/werving/1wvapk.php, diakses pada 15 November 2020.

Tahapan seleksi prajurit TNI, <http://www.tniad.mil.id/werving/1wvpsd.php>, diakses pada 15 November 2020.

Taufik Budi, 21 Oktober 2016, *Jadi Calo Werving, Dua Oknum TNI diajukan ke Pengadilan Militer*, news.okezone.com,
<https://news.okezone.com/read/2016/10/21/512/1520678/jadi-calo-werving-dua-oknum-tni-diajukan-ke-pengadilan-militer>, diakses pada 21 November 2020.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
<https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/UU%2025%202014%20HUKUM%20DISIPLIN%20MILITER.pdf>. Diakses pada 21 November 2020.

